

**KEPENTINGAN INDONESIA IKUT SERTA DALAM KERJASAMA  
INDOMALPHIL TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN  
ABU SAYYAF TAHUN 2016-2018**

**Oleh : Razululul Azmi**

Ululsyazanaz@gmail.com

**Pembimbing : Irwan Iskandar, S. Ip, M A**

Bibliografi: 16 Journals, 24 Books, 7 Thesis, 2 Interview, 7 Official Documents, 4

Official Reports, 26 Internets

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The problem of piracy accompanied from the cases of hostage taking by asking for ransoms that made by the Abu Sayyaf Group in the Sulawesi-Sulu Sea, it caused a serious concern for some contries such as Indonesia, Malaysia and Philipinnes. Indonesia as one of the victims of this piracy ships action was tried to take the steps reorganzie the regional security. The initiation finally found the win-win solution, and the three countries was agreed to meet and discuss this serious problem. Which is, in the end the meeting was beginning of the formation of the three state cooperation. The method of data collecting is done by collecting primer data, then analyzed in qualitative to obtain the draft about the main problem. The method of this research is the method of qualitative explanatif. The data is obtained through primer data such as direct interview via e-mail and chatting to relevant agencies, and the data is obtained secunder data such as book, journal, newspaper and website. From the result of research, that trilateral cooperation initiated by Indonesia as a form of security arrangement in the Sulawesi-Sulu Sea is inseparable from the national interests thats Indonesia wants to protect and achieve. These interests consist of defense, economic, and ideological interests. Trilateral cooperation is well implemented, has minimized cases of piracy and robbery againts ship the next year.*

***Keywords: Indonesia, National Interest, Trilateral Cooperation, Abu Sayyaf, Sulawesi-Sulu Sea.***

## PENDAHULUAN

Dalam sistem internasional, kedaulatan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat absolut akan mengarah pada eksistensi sebuah negara dengan tujuan mendapatkan keamanan atau merasa aman terhadap adanya ancaman, dimana negara perlu membangun kekuatan militer, baik pembangunan kekuatan militer yang bersandar pada kekuatan nasional, aliansi, dan kerjasama sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau implementasi strategi militer untuk mencapai makna keamanan<sup>1</sup>.

Adanya pergeseran pandangan dalam dunia internasional tentang keamanan telah menunjukkan adanya perkembangan kehidupan yang semakin pesat dalam hubungan internasional dan bervariasinya konflik yang telah terjadi. Jika dalam konsep keamanan tradisional negara adalah organisasi politik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya maka dalam konsep keamanan non-tradisional dapat bergantung pada totalitas interaksi antar individu dalam tatanan global.

Bahkan dalam banyak kasus, aktor non-negara memainkan peran yang sangat vital untuk mengatasi berbagai isu-isu keamanan baru yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang perlu dilindungi. Diantaranya seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup serta upaya-upaya

memerangi kejahatan lintas batas<sup>2</sup>. Kejahatan lintas batas atau yang dikenal sebagai kejahatan transnasional dewasa ini semakin mengkhawatirkan berbagai negara di dunia terutama kawasan Asia Tenggara yang mempunyai banyak wilayah perairan.

Sejarah Indonesia telah mencatat permasalahan pembajakan kapal sudah ada dan terjadi terjadi sejak zaman kerajaan maritim besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit<sup>3</sup>. Dimana perkembangan teknologi dan kemajuan arus globalisasi mendukung akan terjadinya peningkatan kasus bajak laut di seluruh perairan dunia. Hal ini dapat terlihat pada sejarah yang mencatat beberapa suku pembajak yang terkenal dan mendapatkan perlindungan dari penguasa lokal mereka seperti pembajak Melayu, pembajak Bugis, pembajak Dayak, pembajak Iranum, dan pembajak Balangingi di Filipina.

Setelah berakhirnya perang dingin, permasalahan pembajakan kapal semakin menunjukkan dan memperlihatkan peningkatan aktivitas yang semakin cepat dan kini telah menjadi perhatian besar saat terjadi di wilayah Asia Tenggara seperti halnya Selat Melaka<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 224.

<sup>3</sup>Ismah Rustam, Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 2 (2017), hal 5.

<sup>4</sup>Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 99.

---

<sup>1</sup>Yugoslav Komeini, Kesiapan Kekuatan Laut Indonesia dalam Menghadapi Keamanan Maritim Indonesia di Asia Tenggara, *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2014): hal. 21-22.

Selain Selat Melaka yang menjadi perhatian Indonesia dalam kasus pembajakan kapal, kini Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan yang sama diperairan Sulawesi-Sulu. Kejahatan bajak laut yang terjadi di wilayah sekitaran Laut Sulawesi-Laut Sulu dilakukan oleh kelompok separatis yang mendiami pulau-pulau kecil terbelakang di Selatan Filipina, antara lain Pulau Jolo, Basilan, Tawitawi dan Mindanao. Kelompok ini merupakan gerakan perlawanan yang lahir dari organisasi yang menuntut kemerdekaan pada pemerintah Filipina. Kelompok ini dikenal dengan nama Abu Sayyaf, merupakan kelompok bersenjata Islam yang paling kecil akan tetapi paling menakutkan di Filipina yang belakangan melakukan aksi kejahatan laut tanpa memandang status kewarganegaraan korbannya<sup>5</sup>.

Pada tanggal 24 Maret 2016 sebanyak 10 ABK kapal tunda Brahma 12 dibajak di Laut Sul dengan rute pelayaran dari Sungai Puting, Kalimantan menuju Batangas, Filipina. Sebulan setelah itu pada tanggal 15 April 2016, 4 awak kapal tunda Henry dan tongkang Christy disergap dan disandera ketika berlayar pulang dari San Fernando, Cebu menuju Tarakan. Disambut dua bulan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2016, 7 WNI yang bekerja sebagai awak kapal tunda Charles 001 dibajak dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dan sempalannya saat berlayar melintasi perairan antara

---

<sup>5</sup>Banloi Rommel C. The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years After 9/11: Threat and Response. *PPVTR Monograph* No. 2 (2008), hal 6.

Pulau Sulu dan Pulau Basilan. Dalam waktu lebih singkat dua minggu setelah itu, pada tanggal 9 Juli 2016 sebanyak 3 WNI awak kapal berbendera Malaysia ditangkap dan disandera di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, oleh Kelompok Apo Mike, sempalan kelompok Abu Sayyaf. Selanjutnya pada bulan Juli 2016 juga terjadi dua kali insiden terhadap kapal Indonesia Fishing Trawler dan kapal Malaysia Serudong 3<sup>6</sup>.

Jika permasalahan ini terus terjadi dan pergerakan politik separatis Abu Sayyaf terus menunjukkan eksistensinya maka dapat dipastikan akan menjadi sebuah permasalahan yang besar serta dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan serta mengancam keselamatan manusia yang berujung pada kerugian bagi negara-negara yang memafaatkan jalur perairan ini dalam perdangan internasional<sup>7</sup>. Upaya pengelolaan dan penanggulangan kejahatan di area perbatasan memang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Sehingga perlu menggalang kerja sama regional untuk mengatasi berbagai isu dan ancaman laut. Kejahatan lintas negara terorganisir berkembang dengan sangat cepat. Karena sifatnya yang melampaui batas negara maka memerlukan pula penyelesaian secara kolektif. Berkaitan dengan permasalahan ini ketiga negara tersebut mulai membicarakan permasalahan yang

---

<sup>6</sup>ReCAAP, *Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships In Asia 2016*, hal. 22.

<sup>7</sup>Dinar Rizky Mautama, *Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia dan Filipina Dalam Mengatasi Kemanan Maritim*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2017), hal 5.

melanda di Perairan Sulawesi- Sulu dalam pertemuan antara tiga negara pada *The 1st Trilateral Defence Minister* yang dilaksanakan di Yogyakarta pada hari Kamis, 05 Mei 2016, sebulan setelah insiden yang sama terjadi di Perairan Sulawesi- Sulu<sup>8</sup>.

Pada pertemuan ini Inisiatif untuk membangun keamanan dengan tujuan memerangi pembajakan dan penyanderaan guna terjaganya keamanan di perairan tersebut dengan menghasilkan sebuah deklarasi bersama (*Joint Declaration*) dalam sebuah bentuk kerjasama trilateral<sup>9</sup>. Dalam hal ini para menteri ketiga negara sepakat untuk mengadopsi praktik- praktik kerjasama ini seperti *Malacca Strait Patrol (MSP)* sebagai model untuk kerjasama trilateral di perairan Sulawesi-Sulu. Dengan demikian ketiga negara mengambil langkah membentuk sebuah Program kelompok kerja patroli keamanan atau *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphil yang akan mengatur arahan operasional pada perilaku

trilateral patroli maritim di Perairan Sulawesi- Sulu<sup>10</sup>.

Kerjasama yang digagas oleh Indonesia dengan Malaysia dan Filipina ini dilakukan atas dasar kepentingan nasional yang ingin di jaga dan di pertahankan dari kejahatan abu sayyaf di perairan Sulawesi-Sulu.

Bergerak dari latar belakang tersebut kepentingan Indonesia ikut serta dalam kerjasama Indomalphil ini ini didasarkan pada kepentingan Pertahanan, Ekonomi dan Ideologi.

1. Pada tahun 2016, kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf dengan kasus penyanderaan ABK kapal kemudian pembajakan ini melintasi Laut Sulawesi yang merupakan pintu utara masuk kapal asing melintasi perairan Indonesia (ALKI II).
2. Perairan Sulawesi- Sulu merupakan rute lalu lintas pelayaran yang padat dimana ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut. Dimana setiap tahunnya dilalui sekitar lebih dari 100.00 kapal.
3. Menghindari penyebaran ideologi yang dianut kelompok Abu Sayyaf yang digolongkan sebagai ideologi radikalisme aliran ISIS berkembang diwilayah Indonesia.

---

<sup>8</sup>Kemlu. "Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan. 5 Mei 2016. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/>. Diakses pada tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 WIB.

<sup>9</sup>Kemlu, "Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of IndonesiaMalaysia-Philippines". 5 Mei 2016. <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-DeclarationForeign-Ministers-and-Chiefs-of-Defence-Forcesof-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx>, diakses pada 02 September 2018 pukul 14.00 WIB.

---

<sup>10</sup>Joint Statement, Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philipines, Malaysia and Indonesia, Manila, 20 Juni 2016.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis pada **Level Negara**, terkait dalam pengambilan kebijakan masalah diplomasi kebijakan. Negara merupakan aktor yang mempunyai peranan dan pengaruh yang paling besar dalam konteks hubungan internasional dan memiliki kebebasan untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Tindakan negara dapat diteliti dari segi politik luar negerinya<sup>11</sup>. Walt menegaskan dalam pandangannya bahwa negara mempunyai kewajiban yang sama dalam berbagai bidang akan tetapi tetap mempunyai kapabilitas yang berbeda-beda dalam tiap negara.<sup>12</sup> Terkait permasalahan pembajakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf terjadi di perairan Sulawesi-Sulu, Indonesia mengambil kebijakan untuk mengamankan di perairan tersebut melalui kerjasama dengan Malaysia dan Filipina serta mengirimkan pasukan pertahanan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan dalam penyelesaian kasus pembajakan yang melanda Indonesia adalah sebagai aktor negara.

Kemudian penulis menggunakan Pendekatan keamanan kawasan dengan meninjau kompleksitasnya ditawarkan Barry Buzan dan Ole Waever melalui *Regional Security Complex Theory (RSC)*<sup>13</sup>. Barry

---

<sup>11</sup>Yessi Olivia, Level Analisis dan Teori Hubungan Internasional, *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1 (2003), hal 139.

<sup>12</sup>Bourke, *International Politics on The World Stage*, (New York:McGraw-Hill/Dushkin 2003).

<sup>13</sup>Barry Buzan and Ole Weaver, *Regions and Powers the Structure of International Security*, (Oxford: Cambridge University Press, 1990.), hal 44.

buzan dalam bukunya yang berjudul *Regions And Powers the Structure of International Security* membahas analisa mengenai *Regional Security Complex*. Konsep RSC menjelaskan bagaimana keamanan dibagi berdasarkan regional geografi, yaitu: Pertama, *Concern* keamanan tidak berjalan jauh dari aktor, maka dari itu ancaman justru lebih mungkin muncul dari region; Kedua, Keamanan setiap aktor dalam region berinteraksi dengan keamanan aktor lain.

Konsep pengaturan keamanan ini membahas mengenai bagaimana negara-negara dalam usaha menciptakan keamanan dan keteraturan kawasan melakukan kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini dipandang sejalan dengan permasalahan yang terjadi di kawasan perairan antara Indonesia, Malaysia, Filipina dimana kasus pembajakan kapal yang akhirnya mendorong ketiga menteri masing-masing negara membentuk suatu forum yang membahas mengenai pengaturan keamanan bagi ketiga negara. Trilateral maritim ini ditujukan untuk menjaga keamanan kawasan tersebut melalui patroli udara dan laut.

Konsep yang digunakan penulis adalah konsep **kepentingan nasional**. Kepentingan nasional diyakini sebagai salah satu konsep paling populer dalam analisa ilmu hubungan internasional, baik digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku internasional<sup>14</sup>. Konsep ini

---

<sup>14</sup> Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal 139.

sering dipakai para analis sebagai suatu dasar pijakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara. Hal tersebut didukung pula dengan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein. Konsep ini terdiri dari 4 konsep dasar, yaitu: Pertama, Kepentingan pertahanan (*defense interest*), yaitu kepentingan bagi negara yang menyangkut baik perlindungan terhadap warga negaranya atau sistem politiknya dari ancaman negara lain baik berupa intervensi maupun propaganda; Kedua, Kepentingan ekonomi (*economic interest*), yaitu kepentingan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain ; Ketiga, Kepentingan tata Internasional (*world-order interest*), yaitu kepentingan negara untuk mempertahankan atau mewujudkan sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi negaranya; Keempat, Kepentingan ideologi (*ideological interest*), yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi negaranya dari ancaman ideologi negara lain<sup>15</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

### Pergerakan Abu Sayyaf

Kelompok Abu Sayyaf terbentuk pada tahun 1991 yang secara literal berarti “pembawa pedang” atau “ayah dari pedang”, tidak dapat dipisahkan dari sosok pendirinya Abdurajak Janjalani, anak dari tokoh ulama Basilan, yang pada

---

<sup>15</sup> Konsep Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, diakses melalui situs <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15016.pdf&ved=2ahUKEwi2p4f7>. Pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 11.40 WIB.

tahun 1980- an bersama dengan ratusan orang militan Moro lainnya mengikuti kamp pelatihan militer Afghanistan, untuk bergabung dengan pasukan Mujahidin Afghanistan dalam melawan invansi dan pendudukan Uni Soviet.

Pada 1987, Abdurajak Janjalani melakukan perjalanan ke Libya dan kemudian bergabung dengan Mujahidin dan bertempur melawan Uni Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan. Di Peswaha Pakistan, Janjalani diperkirakan bertemu dengan penyandang dana Mujahidin dari Arab Saud yaitu Osama bin Laden. Dari Osama, dia menerima bantuan uang senilai 6 juta USD melalui usaha pencucian uang berkedok badan amal milik saudara ipar Osama Bin Laden yaitu Muhammad Jamal Khalifa<sup>16</sup>.

Terkait dengan kepentingan memperluas jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara, Osama bin Laden diyakini memanfaatkan jaringan dengan Abdurajak Janjalani untuk membentuk jaringan sel di Filipina. Dokumen intelijen dari *Philippine National Police* (PNP) menunjukkan bahwa aktor intelektual dari pengeboman *World Trade Center* 1993, Ramzi Yousef mendukung gagasan pembentukan kelompok Abu Sayyaf yang dapat berguna sebagai kontak sel dan jaringan kelompok Selain memberikan dana untuk Abdurajak Janjalani dalam pembentukan kelompok Abu Sayyaf, Osama bin Laden juga memberikan pendampingan terhadap organisasi yang baru terbentuk ini. Wali Khan

---

<sup>16</sup>Kedudukan Abu Sayyaf Teroris di Selatan Filipina, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional>, pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.

Amin Shah seorang militan senior yang berjuang bersama bin Laden di Afghanistan dikirim ke Filipina untuk melakukan rekrutmen, pelatihan militer dan membantu kelompok Abu Sayyaf. Aliran finansial dan pendanaan juga mulai mengalir masuk kepada kelompok Abu Sayyaf. Di buktikan dengan mulai menerima pengiriman senjata dari Victor Blout, pedagang senjata Tajik yang memiliki kontak baik dengan rezim Thaliban maupun jaringan Al Qaeda.

Kelompok Abu Sayyaf kemudian dikenal secara meluas oleh publik ketika aksi pengeboman pertama mereka terjadi pada Agustus 1991 yang menghancurkan kapal M/V Doulos, kapal misionaris Kristen yang berlabuh di Zamboanga, Filipina Selatan<sup>17</sup>. Al Qaeda di Filipina<sup>18</sup>. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf telah dilakukan sejak lama dimana diantara tahun 1991-2000. Tercatat kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil. Pada rentang periode yang sama kelompok Abu Sayyaf tercatat telah melakukan tindakan penculikan dan penuntutan uang tebusan sebanyak 640 kali dan

melibatkan korban penculikan sebanyak 2.076 korban<sup>19</sup>.

Peristiwa demi peristiwa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf menjadi suatu permasalahan internal yang harus dihadapi oleh Filipina. Selain itu, peristiwa ini juga banyak melibatkan warga negara asing didalamnya yang turut menjadi korban. Tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf sudah menjadi permasalahan yang lebih luas, lemahnya Filipina dalam menangani permasalahan ini menjadikan Abu Sayyaf sebagai ancaman serius regional di Asia Tenggara bahkan menjadi daftar terorisme yang paling berbahaya.

## **Kepentingan Indonesia**

### **Pertahanan**

Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan pertahanan dalam jabaran konsep kepentingan nasional adalah kepentingan bagi negara yang menyangkut baik perlindungan terhadap warga negaranya atau sistem politiknya dari ancaman negara lain baik berupa intervensi maupun propaganda<sup>20</sup>. Kerjasama yang dilakukan dengan keinginan ketiga negara ini juga tidak lepas dari kepentingan nasional yang ingin dicapai dan dijaga pada tiap-tiap negara seperti halnya Indonesia. Kepentingan pertahanan Indonesia ikut serta dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia, Filipina pada *Trilateral Maritime Patrol* adalah:

---

<sup>17</sup>Garrett Atkinson, "Abu Sayyaf: Th Father of the Swordsman A review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines", *Journal of American Security Project*, (March 2012), hal 4.

<sup>18</sup>Adhe Nuansa, *Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan, Analisis Organisasi Terorisme – Asia Tenggara*, ( 2014), hal. 2.

---

<sup>19</sup>Abu Sayyaf Teroris di Selatan Filipina, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com> pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB.

<sup>20</sup>Konsep Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, *Op. Cit.*

#### A. *Perlindungan Keselamatan bagi Warga Negara Indonesia*

Penculikan empat belas anggota awak Indonesia pada 26 Maret dan 13 April 2016 menandai angka jumlah korban yang sangat tinggi selama ini yang dihitung. Itu pertama kalinya WNI telah menjadi target ASG dan pertama kali kapal dagang asing diserang. Dari 54 pelaut yang diculik di Sulu-Sulawesi antara Maret 2016 dan Maret 2017, 24 adalah orang Indonesia. Negara berkewajiban penuh melindungi warga negara dan properti negara sebagai wujud sistem pertahanan semesta .

Menurut Pusat Berbagi Informasi ReCAAP, dari tahun 2016 hingga sampai ada paruh pertama 2018 telah terjadi 13 serangan aktual dengan total total 61 anggota awak diculik, 28 telah dibebaskan (sering setelah pembayaran tebusan oleh pemilik kapal), 17 diselamatkan dan tujuh dinyatakan tewas dan 9 masih ditahan di penangkalan .

#### b. *Melindungi dan Menghindari Terganggunya Sistem Politik Luar Negeri Indonesia Untuk Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia*

Konsep Nawacita yang dicetus oleh Presiden RI Bapak Ir. Jokowi, Indonesia dicanangkan sebagai negara Poros Maritim Dunia. Dalam Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia dijabarkan bahwasanya Poros Maritim Dunia adalah suatu visi untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan

perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional<sup>21</sup>. Untuk menjadi poros maritim dunia tentunya banyak hal maupun kebijakan- kebijakan yang harus di lakukan salah satunya adalah pertahanan, keamanan, penengakan hukum dan keselamatan laut<sup>22</sup>.

Membangun pertahanan dan keamanan di wilayah maritim Indonesia merupakan hal yang perlu dilakukan guna terciptanya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memerangi kejahatan yang ada di laut terutama laut Indonesia. Dengan bekerjasama dengan Malaysia dan Filipina secara tidak langsung Indonesia kembali mengatur ulang keamanan yang dapat memeberikan peluang kembalinya akan pembangunan tol laut baik domestik maupun internasional

#### **Kepentingan Ekonomi**

Ikut serta Indonesia dalam kerjasama trilateral untuk mengatasi permasalahan di perairan tersebut, hal ini tidak lepas dari kepentingan nasional Indonesia dibidang ekonomi diantaranya adalah;

#### A. *Menjaga Arus Perdagangan Indonesia dengan Filipina*

Perairan Sulawesi-Sulu memiliki arti penting bagi Indonesia

---

<sup>21</sup>Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman RI, *Kebijakan kelautan Indonesia*, diakses melalui <http://sipuu.setkab.go.id/lampiran.pdf> pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>22</sup>Salah satu kebijakan dari 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia dalam peta jalan kebijakan kelautan Indonesia menuju poros maritim dunia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

sebagai rute perdagangan internasional bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwasanya setiap tahunnya jalur Perairan Sulawesi-Sulu ini dilewati lebih dari 100.000 kapal. Selain itu, kargo yang lewat bernilai sekitar 40 miliar dollar, di antaranya 700-800 juta dollar berupa ekspor batu bara Indonesia ke Filipina. Dalam hal ini Filipina menjadi salah satu negara tujuan ekspor batu bara dari Indonesia untuk kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut. Indonesia menjadi sumber utama impor batubara oleh Filipina.

Kebutuhan Filipina yang tinggi akan batubara mendorong besarnya impor akan komoditas tersebut. Setiap tahunnya, Filipina mengimpor 15 juta ton batubara pertahun, dimana jumlah tersebut merupakan 80 persen dari batubara yang mereka butuhkan. Kemudian, 95 persen dari impor batubara mereka berasal dari Indonesia<sup>23</sup>.

#### *B. Jalur Tumbuhnya Kegiatan Ekspor/Impor KTI*

Kepentingan Indonesia dibidang ekonomi lainnya di perairan ini adalah untuk menjaga tetap tumbuhnya kegiatan ekspor/ impor dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Mengingat pengembangan konektivitas maritim selama ini kawasan timur yang hanya mencakup 50% wilayah Indonesia masih sangat tertinggal. Dalam beberapa tahun

terakhir pelayaran ekspor/impor dari KTI mengalami peningkatan. Dimana Pelabuhan Makassar telah memulai *direct call* sejak Desember 2015 dengan tujuan Hongkong, yang kemudian berkembang hingga ke-45 negara tujuan. Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah juga telah melakukan ekspor langsung ke Thailand sejak Maret 2017.

#### *C. Mengurangi Beban Biaya Pengeluaran Perusahaan Indonesia*

Kepentingan ekonomi lainnya adalah untuk menghindari dan mengantisipasi akan besarnya biaya yang harus dikeluarkan Indonesia dalam memeberikan uang tebusan WNI yang bmenjadi korban ataupun perusahaan pelayaran, misalnya beban biaya bahan bakar karena kapal harus berlayar dalam kecepatan tinggi di daerah yang rawan, beban biaya untuk menyewa pengawalan bersenjata dan perlengkapan keamanan lainnya, beban biaya asuransi, dan sebagainya

#### *D. Menjaga Arus Perdagangan Kerjasama BIMP-EAGA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*

Lahirnya kerjasama keamanan di Laut Sulawesi-Sulu sendiri memberikan keuntungan tersendiri bagi kepentingan Indonesia dan Filipina, khususnya dalam kerjasama BIMP-EAGA. Sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antara negara-negara anggota BIMP-EAGA khususnya dalam bidang perdagangan, sangat penting untuk mengamankan rute-rute perdagangan, baik rute darat, laut, dan udara. Laut Sulu yang berbatasan dengan negara-negara

---

<sup>23</sup>Volume dan Nilai ekspor batu bara dari Indonesia ke Filipina, diakses melalui <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/volume-dan-nilai-ekspor-batubara-dari-indonesia-kefilipina-1477888169>, pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

BIMPEAGA merupakan salah satu rute penting yang jika dioptimalkan, maka akan meningkatkan perekonomian wilayah-wilayah pembangunan dari negara-negara anggota BIMPEAGA.

### **Keentingan Ideologi**

#### *A. Mengatasi dan Mengawasi Peyebaran Jaringan Abu Sayyaf di Indonesia*

Dengan ikut serta dalam kerjasama Indomalphil ini Indonesia berupaya untuk mengawasi dan mewaspadi pergerakan radikalisme ISIS berkembang di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pergerakan separatis dan aksi terorisme di Indonesia yang dapat mengancam keamanan Indonesia serta menimbulkan kekacauan. Para petempur ISIS/IS telah membangun dan memiliki jejaring yang luas di kawasan ini. Dengan aktivitas jejaringnya yang canggih dan sumber daya yang banyak yang mereka miliki, kawasan ini menjadi menarik buat mereka untuk didatangi. Selama beberapa dasawarsa, wilayah Filipina Selatan tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Pemerintah Filipina, terutama dari segi keamanan. Wilayah ini dipenuhi konflik dan aksi-aksi bersenjata, kekerasan dan kriminal dari kelompok separatis dan radikal keagamaan, seperti MNLF, MILF, Abu Sayyaf, Maute dan lain-lain<sup>24</sup>.

#### *B. Mewaspada dan Memantau Para Pendukung dan*

---

<sup>24</sup>Poltak Partogi Nainggolan, Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Wacana atau Realistis?, *Laporan Penelitian: Pusat Penelitian DPR RI* (2017), hal 5.

#### *Simpatisan Teroris Pro-ISIS Asal Indonesia dapat Bergabung dan Masuk Ke Filipina Selatan*

Eksistensi pergerakan Abu Sayyaf yang merupakan basis ISIS di Asia Tenggara dewasa ini sangat ditakuti karena aktivitas mereka dalam terus menyebarkan ideologi terorisme dan memiliki kemampuan dalam melakukan propaganda untuk mencari simpatisan dan merekrut pengikut baru. Semakin meluasnya pengaruh kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan khususnya di perbatasan Malaysia-Filipina-Indonesia, membuat wilayah perairan maupun daratan di perbatasan ketiga negara itu akan mengalami proses destabilisasi keamanan. Oleh karenanya permasalahan ini berbatasan dengan perbatasan ketiga negara, Indonesia memprakarsai sebuah langkah untuk bekerjasama dengan Malaysia dan Filipina dalam mengatasi kasus dan permasalahan tersebut. Terlebih lagi adanya pertempuran baku tembak antara kelompok Abu Sayyaf dengan tentara pertahanan Filipina di Marawi yang menjadi sebuah konflik menyita perhataan masyarakat ASEAN. Hal ini yang perlu diwaspadai akan partisipan Abu Sayyaf untuk membantu rekan mereka bertempur di Kota Marawi melalui wilayah perbatasan darat dan laut. Mengingat bibit radikalisme terorisme telah ada dan tumbuh di Indonesia .

#### **Implementasi Kerjasama Trilateral Indomalphil dalam Patroli Maritim Terkoordinasi**

*Trilateral Maritime Patrol* (TMP), diklaim keberhasilan didasarkan pada jeda 20 bulan dalam

penculikan yang berakhir pada September 2018<sup>25</sup>. Hal ini dilihat dari poin-poin kerjasama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera. Diantaranya adalah:

a. Terselenggaranya *Joint Patrol*

Patroli laut bersama diresmikan dengan penuh kemeriahan pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, diadiri oleh komandan militer dan menteri pertahanan dari tiga negara dengan pengamat dari Singapura dan Thailand serta melibatkan kapal perang dari ketiga negara. Presmian dilakukan secara simbolis dengan penekanan tombol sirine oleh Menhan dari ketiga negara diatas kapal perang TNI Angkatan Laut KRI dr. Soeharso-990 serta dihadiri oleh panglima angkatan bersenjata dari tiga negara. Pada tanggal 12 Oktober 2017 Indonesia Malaysia dan Filipina juga melaksanakan patroli udara di Air Force Base, Subang, Malaysia. Diketahui dalam patroli yang dilaksanakan di Subang, Malaysia sebagai tuan rumah akan memimpin patroli ini terlebih dulu dengan mengerahkan pesawat Angkatan Udara Kerajaan Malaysia yang kemudian diikuti oleh Indonesia dan Filipina. Selanjutnya yang dilakukan ketiga negara adalah penerbangan bulanan dengan

---

<sup>25</sup>IPAC, *Op. Cit.*

masing-masing negara peserta bergantian melakukannya<sup>26</sup>.

b. Terbentuknya Pos Komando

Pembentukan tiga pos komando Maritime Command Center adalah untuk memfasilitasi koordinasi, antara lain: Bongao di Filipina, Tawau di Malaysia, dan Tarakan di Indonesia. Pos-pos tersebut akan digunakan untuk menunjukkan rute laut dan pengawasan udara. Pusat Komando Maritim ditetapkan oleh masing-masing negara dan harus memegang tanggung jawab secara keseluruhan untuk tugas dan penerapan aset masing-masing yang dimaksudkan, adalah telah dilakukan pembagian tugas masing-masing yang berjaga di pos komando, kapal laut, dan pesawat udara yang akan dilakukan oleh peserta aparat dari masing-masing negara.

c. Latihan Militer Gabungan

Ketiga negara melakukan latihan angkatan laut bersama pada tanggal 20 Juni 2017 di Perairan Tarakan Kalimantan- Indonesia yang diikuti dengan Helikopter tempur yang mengudara di kawasan tersebut. Latihan gabungan ini akan terus dilakukan dengan perubahan kawasan sesuai kesepakatan yang ditetapkan. Latihan ini juga menandai peluncuran koordinasi patroli bersama<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Departemen of National Defens Philippines, *Indonesia, Malaysia dan Philippines Launch Trilateral Air Patrol*, diakses melalui situs <http://www.dnd.gov.ph/pdf2017/DND> pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 13.00.

<sup>27</sup>Indonesia, Malaysia dan Filipina gelar latihan tempur di Laut Sulawesi-Sulu,

d. Adanya *Quick Response*

Peresmian patroli terkoordinasi *Maritime Command Center*, juga ditandai dengan demonstrasi *Indomalphi Quick Response*, yaitu memberi bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan daerah perhatian bersama.

e. Terbangunnya Koridor transit di wilayah maritim sebagai jalur laut.

Jalur koridor transit di lokasi yang ditunjuk merupakan jalur yang sama dengan pos komando yaitu Tarakan, Tawau dan Bongao. Namun Pada bulan Juli, Indonesia dan Filipina menciptakan rute pelayaran baru yang menghubungkan kota-kota Davao, General Santos dan Provinsi Sulawesi Utara.

f. Terbentuknya *Hotline Communication*

Pada kesepakatan pembentukan saluran komunikasi ini dimaksudkan agar membentuk jaringan komunikasi yang memudahkan pelaut yang mengalami situasi kritis dapat direspon secara cepat oleh aparat pemerintahan yang bertugas, namun fakta yang terjadi dilapangan untuk melayani masyarakat lokal masih belum terakomodir untuk jalur pelaporan sehingga untuk sementara aparat yang bertugas dibantu oleh pihak intel untuk berkomunikasi ataupun mendapatkan informasi.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Hastin Selaku Wakil Direktur Asia

---

diakses melalui <https://m.dw.com> pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Tenggara Kemlu, kerjasama ini membawa pengaruh besar bagi pengaturan ulang keamanan kawasan dan membawa penuh peran masing negara, selain itu kerjasama ini memberikan keuntungan untuk Indonesia dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Kerjasama ini dibangun atas dasar keinginan bersama dan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan mengatsi kejahatan Abu Sayyaf<sup>28</sup>.

### Kesimpulan

Perairan Sulu merupakan hamparan laut besar yang terletak di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Bentangan laut ini mencakup area seluas 900.000 km<sup>2</sup> (hampir 350.000 mil<sup>2</sup>) dan menyediakan mata pencaharian dan makanan lebih dari 40 juta orang. Selain itu perairan Sulu memiliki sebuah nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan, perairan ini memiliki sebuah jalur lintas kapal-kapal niaga yang memiliki muatan penuh yang tidak dapat melalui jalur Selat Malaka yang sangat padat.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan yang datang akhirnya pada bulan juni 2017 kerjasama ini berhasil dilaksanakan dengan membentuk *Trilateral Maritime Patrol Indomalphil*. Selain merupakan langkah pencegahan agar tidak adanya penculikan, peningkatan keamanan dengan adanya kerjasama keamanan di Laut Sulu tidak terlepas dari kepentingan

---

<sup>28</sup>Hastin Aristiya Bakti, wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Direktorat Asia Tenggara Deputy Director 1 Asteng melalui Chatting pada tanggal 8-9 Januari 2019.

tiap negara terutama Indonesia baik dibidang pertahanan, ekonomi dan ideologi. Indonesia dan Filipina merupakan negara yang kepentingan ekonominya terganggu akibat penculikan Kelompok Abu Sayyaf. Penculikan yang terjadi pada tahun 2016 sempat mengganggu jalur perdagangan laut antara Indonesia dengan Filipina.

Pemerintah Indonesia yang kemudian memutuskan melarang pelayaran ke Filipina juga menghambat pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina. Padahal, Indonesia merupakan sumber impor batubara terbesar bagi Filipina. Kebutuhan energi Filipina serta pemasukan Indonesia yang terganggu tersebut yang kemudian mendorong dilaksanakannya kerjasama keamanan agar memastikan kepentingan ekonomi kedua negara terjaga. Terkait implementasi kerjasama trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam menanggulangi kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan perbatasan ketiga negara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi dari 6 poin kesepakatan kerjasama tersebut dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dari 6 program kerja tersebut semuanya saling terintegrasi dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari poin-poin kerjasama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Adhe Nuansa. Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan, *Jurnal Analisis Organisasi Terorisme – Asia Tenggara*. 2014.
- Atkinson, Garrett. “Abu Sayyaf: Th Father of the Swordsman A review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines”. *Journal of American Security Project*, March 2012
- Rustam, Ismah. Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 14, No.2*. 2017.
- Yessi Olivia. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional Vol.5, No.1* .2013.
- Yugoslav Komeini. Kesiapan Kekuatan Laut Indonesia dalam Menghadapi Keamanan Maritim Indonesia di Asia Tenggara. *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 2 No. 2 , 2014.

### Buku

- Banloi, Rommel C. The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years After 9/11: Threat and Response. PPVTR Monograph No.2 September 2008.
- Bourke. *International Politics on The World Stage*. New York:McGraw-Hill/Dushkin 2003.
- Buzan, Barry and Ole Weaver. *Regions and Powers the Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press. 1990.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia*

- Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Wawasan Nusantara dari Segi Geopolitik dan Geostrategis" dalam Strategi Kelautan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998.
- Syamsumar Dam. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Karya Ilmiah**
- Dinar Rizky Mautama. *Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia dan Filipina Dalam Mengatasi Keamanan Maritim*. (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2017).
- Dokumen Resmi**
- Joint Statement, Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philippines, Malaysia and Indonesia*, Manila, 20 Juni 2016.
- Poltak Partogi Nainggolan, Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Wacana atau Realistis?, Laporan Penelitian: Pusat Penelitian DPR RI ( 2017), hal 5
- Departemen of National Defens Philippines, Indonesia, Malaysia dan Philippines Launch Trilateral Air Patrol, diakses melalui situs <http://www.dnd.gov.ph/pdf2017/DND> pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 13.00
- Wawancara**
- Hastin Aristiya Bakti, wawancara dengan Kementrian Luar Negeri Direktorat Asia Tenggara Deputy Director 1 Asteng.
- Internet**
- Abu Sayyaf Teroris di Selatan Filipina. diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/>
- Indonesia, Malaysia dan Filipina gelar latihan tempur di Laut Sulawesi-Sulu. diakses melalui <https://m.dw.com/>
- Kedudukan Abu Sayyaf Teroris di Selatan Filipina, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional>.
- Kemlu. *Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia Malaysia-Philippines*. diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-DeclarationForeign-Ministers-and-Chiefs-of-Defence-Forcesof-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx>.
- Kemlu. "Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan. 5 Mei 2016. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/>
- Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman RI. *Kebijakan kelautan Indonesia*, diakses melalui <http://sipuu.setkab.go.id/lampiran.pdf>.
- Konsep Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional ,diakses melalui situs <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15016.pdf&ved=2ahUKEwi2p4f7>